

Persepsi Perempuan dan Kesetaraan Gender Dalam Konteks Peningkatan Perekonomian Keluarga

Seffi Lolita¹ Ujang Jamaludin² Ronni Juwandi³

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, Indonesia^{1,2,3}
Email: seffilisa@gmail.com¹ ujangjamaludin@untirta.ac.id² ron_roju@untirta.ac.id³

Abstrak

Seiring perkembangan zaman, meningkatnya tuntutan kebutuhan rumah tangga dan sempitnya lapangan pekerjaan serta kultur sosial budaya. Tidak sedikit dari kaum perempuan yang memilih bekerja hingga ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia. Kesetaraan gender dalam pekerjaan adalah tanggung jawab pemerintah untuk melindungi hak-hak rakyat. Untuk itu, dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan kesadaran gender bagi pekerja perempuan. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan persepsi perempuan mengenai eksistensi kesetaraan gender dalam perekonomian keluarga dan peran pemerintah terkait bagi pekerja perempuan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menggambarkan bahwa memiliki perbedaan persepsi yaitu 1) persepsi positif memperbolehkan perempuan bekerja 2) persepsi negatif beranggapan bahwa perempuan pekerja migran meninggalkan perannya sebagai ibu sehingga kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian pemerintah daerah Kabupaten Serang melalui DKBP3A juga membuat kebijakan dan pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender termasuk Peran Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang kemudian disosialisasikan kepada tiap kecamatan Kabupaten Serang.

Kata Kunci: Persepsi Perempuan, Kesetaraan Gender, Perekonomian Keluarga



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Masih banyaknya permasalahan terkait batasan antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, yang mana perempuan dianggap berdasarkan sudut pandang ciri-cirinya, kedudukannya, fungsinya dalam keluarga, masyarakat, dan pendidikan. Posisi perempuan selama ini selalu dikaitkan dengan urusan rumah tangga dan keluarga yang mana dianggap kurang mampu atau bahkan tidak mampu memainkan peran domestik publik. Sementara laki-laki dikaitkan dengan pekerjaan diluar rumah. Tentunya hal ini menggambarkan ketidakadilan bagi kaum perempuan karena ketidaksetaraan gender. Sebagaimana Menurut Handayani dan Sugiyarti dalam (Novita: 2019:2) ketidaksetaraan gender telah melahirkan gender inequalities yang mana terwujud dalam mempersepsi, memberi nilai, serta memberi tugas antara anak laki-laki dan anak Kerja merupakan hak setiap orang dan bagi rumah tangga kerja sebagai tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Perempuan juga dapat berperan sebagai tenaga kerja untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Apabila penghasilan dari satu pekerjaan dirasa tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. kontribusi perempuan bekerja keras untuk membantu perekonomian keluarganya bahkan hingga bekerja sampai ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mana dilakukan sedemikian mungkin untuk memerdekakan diri dan keluarganya.

Banten merupakan salah satu provinsi sebagai penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar bahkan sampai skala nasional yang berasal dari empat Kecamatan yakni

Pontang, Tanara, Tirtayasa, dan Lebakwangi, dilansir dari (Kabar Banten.com). Berdasarkan empat kecamatan yang telah disebutkan, Kecamatan Pontang merupakan wilayah terbesar dengan luas wilayah 64.85km² 4.42% (Sumber: serangkab.bps.go.id). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana persepsi perempuan tentang kesetaraan gender dalam konteks peningkatan ekonomi keluarga di tengah stigma-stigma masyarakat yang masih berkembang terhadap terbatasnya gerak perempuan dalam memperoleh pekerjaan. Serta bagaimana peran pemerintah terkait dalam mengedukasi kesetaraan gender pada Masyarakat kabupaten serang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif agar hasil penelitian dapat bersifat terbuka dan mendalam. Metode penelitian kualitatif dapat memberi pemahaman yang mendalam tentang permasalahan yang dikaji dalam sebuah penelitian sehingga memudahkan peneliti. Menurut Creswel (2008) dalam (Conny R Semiawan: 2010:7) metode penelitian kualitatif merupakan penelaahan dalam meneliti serta memahami suatu fenomena yang terjadi di masyarakat. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu untuk menemukan jawaban atas fenomena yang dialami subjek penelitian atau pertanyaan penelitian melalui prosedur alamiah dan sistematis dengan cara menggambarkan data yang ditemui dilapangan baik berupa kata-kata, dokumentasi atau foto dan pengamatan lainnya yang kemudian dianalisis.

Penelitian ini akan menganalisis persepsi perempuan tentang kesetaraan gender dalam konteks perekonomian keluarga. Sebagaimana Menurut Conny R Semiawan (2010:7) penelitian kualitatif merupakan gambaran dari suatu fenomena yang diteliti sebagai hasil analisis dari peneliti, artinya dalam penelitian kualitatif kemahiran peneliti dalam menganalisis data harus dipertajam karena sangat menentukan makna mendalam dari suatu kajian yang dianalisis. Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat, pertama di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang dengan lima responden purna TKW, kedua penelitian di lakukan di Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Kabupaten Serang yang bernarasumber kepala bidang advokasi dan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi yang mana data yang didapat akan di analisis dengan model analisis miles dan huberman yakni dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dari ke lima narasumber (purna TKW) tentang pandangannya pada perempuan yang memilih bekerja, yang menghasilkan pandangan yang berbeda-beda. Terkait dengan pandangan kepada perempuan yang menjadi TKW dengan berbagai alasannya, ke lima narasumber (purna TKW Perempuan) secara garis besar menyatakan bahwa dengan faktor utamanya seseorang memilih menjadi TKW yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga atau meningkatkan perekonomian keluarganya, dan terbatasnya kesempatan kerja yang ada di dalam negeri akhirnya tidak ada lagi batasan bagi perempuan untuk turut membantu suaminya bekerja hingga menjadi TKW adalah pilihannya.

Adapun kondisi perekonomian purna TKW di Desa Wanayasa ini cenderung mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik setelah mereka menjadi TKW, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan pada ke enam narasumber (Purna TKW perempuan) yang

mneyatakan bahwasanya kondisi perekonomian mereka berada pada ekonomi lemah dan berstatus sosial rendah. Setelah bekerja menjadi TKW membuahkan hasil dan peningkatan taraf hidup, selain dari segi pengetahuan dan juga pengalaman, tingkat penghasilan yang mereka miliki di luar negeri lebih memuaskan baik menurut individu maupun keluarga yang ditinggalkan. Keberhasilan yang mereka peroleh menimbulkan perubahan mulai dari memiliki tabungan yang cukup, membeli kebutuhan yang diperlukan (sandang, pangan, papan), biaya pendidikan anak, hingga gaya hidup sebagian orang.

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, DKBP3A sendiri memiliki tugas dan fungsi yaitu merumuskan kebijakan daerah dan melaksanakan teknis penyusunan kebijakan daerah yang spesifik di bidang keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Tujuan dari DKBP3A dalam pemberdayaan perempuan memfokuskan pada meningkatnya partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, meningkatkan partisipasi perempuan di lembaga swasta, meningkatkan partisipasi perempuan pada angkatan tenaga kerja, serta membantu dalam pemberdayaan ekonomi Perempuan. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Eman Herman yang menyatakan bahwa:

“Mengenai gender ada yang masih rancangan dan alhamdulillah ada yang sudah berjalan tentunya saat perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) perlu diselaraskan baik dari sinkronisasi hingga koordinasi pelaksanaannya dengan kewenangan provinsi maupun kabupaten agar kegiatannya tidak tumpang tindih. Kemudian advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk Peran Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang disosialisasikan kepada tiap kecamatan kabupaten Serang. Turun ke masyarakat dan menyampaikan bimbingan teknis tentang konsep gender ke masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender ke masyarakat”.

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa DKBP3A juga menjadi salah satu instansi resmi di bawah naungan pemerintah daerah guna menjadi salah satu stakeholder pertama yang berkewajiban mengedukasi perempuan tentang kesetaraan gender. Oleh karena nya, DKBP3A bertanggung jawab dalam memberi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan terhadap perempuan serta penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender. Sosialisasi meningkatkan kualitas hidup yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kualitas kehidupan dari segala aspek dengan harapan mengurangi adanya kesenjangan sosial dan terwujudnya kesejahteraan sosial serta kehidupan masyarakat yang sehat.

Rancangan perumusan kebijakan diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antara daerah dengan pusat agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Kemudian, perihal teknis nya DKBP3A turun langsung ke lapisan masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi yang disampaikan mengenai konsep gender, peran perempuan, serta konsep mendasar peran dan fungsi yang dilakukan dalam keluarga. DKBP3A juga melakukan pembinaan ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia di yang ada pada setiap kecamatan. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui usaha mikro dan mengurangi tingkat pengangguran di daerah. Serta pilihan menjadi pekerja migran bukanlah pilihan satu-satunya.

Edukasi akan gender memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Sehubung wilayah Kecamatan Pontang merupakan salah satu wilayah kantong PMI. Maka sosialisasi gender kepada para calon pekerja migran juga perlu. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan bidang ketenagakerjaan yaitu Disnakertrans dan UPT BP2MI mengenai edukasi pentingnya memilih keberangkatan PMI legal serta negara penempatan yang responsif gender. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan kekerasan hingga eksploitasi tenaga kerja. Perempuan di Desa Wanayasa, Kecamatan Pontang mayoritas sebagai ibu rumah tangga, ada juga yang bekerja di sektor unit usaha memproduksi bontot sebagai salah satu produk makanan

lokal. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan rumah tangga sedangkan sempitnya lapangan pekerjaan bagi perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Adapun dari mereka yang lebih memilih bekerja ke luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia. Pada dasarnya kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nya, akan tetapi hal ini bisa dirundingkan jika perempuan mau bekerja membantu perekonomian keluarganya.

Pembahasan

Pemahaman mengenai istilah kesetaraan gender bagi masyarakat Desa Wanayasa masih terdengar asing. Namun pada praktiknya sudah berjalan semestinya yang mana perempuan saat ini sudah memilih bekerja untuk membantu mensejahterakan keluarganya. Sejahtera dalam artian disini ialah dengan meningkatkan perekonomian, kualitas kesehatan, dan juga tingkat pendidikan yang lanjut dalam sebuah keluarga. Kondisi perekonomian Desa Wanayasa Kecamatan Pontang menunjukkan bahwa mata pencaharian mayoritas mengurus tambak, nelayan, dan petani. Kemudian untuk perempuannya sebagai ibu rumah tangga atau mengembangkan UMKM makanan khas daerah tersebut yaitu bontot yang dibuat dari olahan ikan payus dan menjadi kearifan lokal daerah tersebut.

Pada penelitian ini yang menjadi sorotan yaitu kondisi perekonomian purna TKW sebelum berangkat ke luar negeri dengan keadaan tingkat perekonomian yang berbeda-beda, baik dari ekonomi menengah ke bawah maupun ekonomi menengah ke atas. Penghasilan yang didapatkan dari mengurus tambak, nelayan, atau bertani tentunya tidak menentu banyaknya faktor yang mempengaruhinya. Memenuhi kebutuhan rumah tangga memang tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga, akan tetapi ada kalanya pendapatan yang dihasilkan oleh suami dirasa kurang mencukupi ditambah dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Penghasilan dari satu pekerjaan masih dirasa belum dapat mencukupi kebutuhan keluarga, maka banyak perempuan yang seringkali berusaha mendapatkan penghasilan tambahan dengan mencari peluang kerja. Sejalan dengan teori pendapatan menurut Pertiwi (2015) yang menyatakan bahwa pendapatan diperoleh melalui kerja, baik di sektor formal maupun informal.

Pada penelitian ini menghasilkan dua persepsi, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Menurut Robbins dalam (Deriyanto, 2018: 79) Persepsi positif adalah pengukuran individu dalam suatu objek atau informasi berdasarkan pengamatan yang positif atau objek yang dilihat telah ditanggapi sesuai dengan apa yang diharapkan dari objek tersebut berdasarkan dengan aturan yang ada. Sementara persepsi negatif merupakan tanggapan negatif dari individu terhadap suatu objek yang dilihatnya. Persepsi positif mengenai kesetaraan gender dalam konteks peningkatan perekonomian keluarga tidak lagi terpaku pada laki-laki sebagai kepala keluarga dalam mendapatkan pendapatan, perempuan juga dapat turut serta membantu hingga menjadi sumber pendapatan bagi suatu keluarga. Sehingga kedudukan antara laki-laki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai istri tidak lagi mengalami ketimpangan yang signifikan dimana keduanya saling bahu membahu untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarganya. Hal ini menjadi perkembangan yang cukup baik karena tidak ada lagi batasan bagi perempuan untuk tidak diizinkan mencari pekerjaan dalam konteks peningkatan perekonomian keluarganya sendiri.

Adapun persepsi negatif yang dihasilkan oleh dua informan lainnya yaitu berpandangan bahwa perempuan yang memilih bekerja bahkan hingga menjadi pekerja migran meninggalkan perannya sebagai ibu rumah tangga. Artinya, meninggalkan tanggung jawab dalam mengasuh anak yang mana pola asuh diberikan oleh pihak keluarga sehingga kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Anggapan lainnya pekerja migran memiliki resiko yang besar seperti jauh dari keluarga, dan mengkhawatirkan adanya tindakan-tindakan yang tidak

diinginkan. Keduanya pun merasakan dilema, di sisi lainnya berdampak positif bagi perekonomian keluarga. Berdasarkan hasil penelitian, alasan menjadi TKW terbagi menjadi dua bagian yaitu faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi terdapat menjadi beberapa alasan yaitu: 1) Membantu perekonomian keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, dikarenakan pendapatan yang dimiliki saat itu dirasa kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga, 2) Membutuhkan biaya di awal untuk pekerjaan yang layak (biaya calo), 3) Dilema dengan tuntutan kebutuhan hidup yang terus meningkat (biaya pendidikan, makan sehari-hari, transportasi, hingga biaya kebutuhan orang tua). Selanjutnya alasan menjadi TKW yang termasuk ke dalam faktor non-ekonomi, yaitu: 1) Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, hal ini dikarenakan terbatasnya kemampuan dan pengalaman para pencari kerja dan kebutuhan perusahaan (kualifikasi kerja yang dibutuhkan), 2) Faktor lingkungan, menjadi TKW adalah hal yang lumrah di Desa Wanayasa, Kecamatan Pontang, 3) Faktor dukungan keluarga, 4) Ambisi diri yang kuat untuk memiliki aset mulai dari membangun rumah, kendaraan pribadi, serta barang elektronik.

Isu gender dalam rumah tangga tidak lagi menjadi permasalahan karena perempuan sudah memiliki kebebasan dalam mendapatkan pendapatan, perempuan dapat turut serta membantu perekonomian keluarganya. Akan tetapi, kesenjangan gender masih dirasakan pada bidang ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh kultur budaya sosial dan institusi pemberi kerja. Faktor yang mempengaruhinya adalah anggapan pemberi kerja bahwa pekerja perempuan memiliki tingkat pendidikan dan pengalaman yang lebih rendah. Ini erat kaitannya dengan fakta bahwa latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi dan menentukan upah kerja. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Becker (1975) mengenai teori *Human Capital* yang mengatakan bahwa tingkat upah dipengaruhi oleh pendidikan, latihan, keterampilan, dan pengalaman kerja. Dengan kondisi tersebut, banyaknya perempuan yang memilih bermigrasi bekerja ke luar negeri didorong oleh motivasi seperti perubahan pada kondisi perekonomian rumah tangganya dan upah bekerja yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Kemudian dukungan dan doa restu dari keluarga, serta ambisi untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga juga menjadi dorongan untuk bekerja di luar negeri. Jalur bermigrasi keluar negeri atau menjadi pekerja migran biasanya ditempuh melalui dua jalur, yaitu legal dan ilegal. Calon pekerja migran yang mengikuti jalur legal akan mengikuti tahapan dan prosedur resmi dari Pemerintah. Sementara jalur ilegal menggunakan jasa calo atau agen penyalur tenaga kerja yang tidak terdaftar secara resmi.

Fakta yang ada di lapangan menunjukkan masih banyak calon pekerja migran yang menggunakan jalur ilegal, dikarenakan proses melalui jalur ilegal biasanya lebih singkat karena proses pengurusan administrasi dibantu penyelesaiannya oleh calo atau agen. Hal ini tentu menjadi daya tarik bagi calon pekerja migran yang tidak mau ambil pusing karena prosesnya yang lebih mudah dan tidak memberatkan. Serta, ada sistem uang muka yang diberikan kepada calon pekerja migran oleh agen atau calo sebelum berangkat ke negara penempatan. Persyaratan yang diberikan oleh jasa penyalur tenaga kerja ilegal tidaklah ketat, sehingga siapa saja yang memiliki kemauan dan tekad untuk bekerja di luar negeri dapat dengan mudah lolos melalui jalur ini. Hal ini tentu beresiko karena dapat menimbulkan masalah di kemudian hari, karena status visa yang tidak resmi. Lain halnya dengan jalur legal yang resmi melalui Pemerintah. Persyaratan yang diberikan relatif lebih ketat, seperti batas umur minimum, kondisi medis yang harus dipenuhi yang dibuktikan melalui medical check-up, asuransi, dan lain sebagainya. Hal ini tentu dilakukan oleh Pemerintah agar pekerja migran dapat memiliki daya saing di negara penempatan dan meminimalisir risiko yang dapat dialami. Dengan demikian, adanya jaminan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran, baik oleh Pemerintah Indonesia maupun Pemerintah negara penempatan.

Dengan kondisi seperti ini, calon pekerja migran dihadapkan pada dua pilihan yaitu jalur ilegal yang mudah dan cepat atau jalur legal yang resmi dan aman, namun memakan waktu. Dalam situasi seperti ini, pengambilan keputusan menjadi hal yang krusial. Latar belakang dari calon pekerja migran akan berpengaruh terhadap keputusan yang diambil. Faktor usia dan pendidikan sering kali menjadi penentu. Bagi calon pekerja migran yang belum berusia legal, pendaftarannya untuk menjadi pekerja migran akan sulit dilakukan. Sehingga, mendaftar secara ilegal menjadi pilihannya. Faktor lain penyebab calon pekerja migran mendaftar ilegal adalah minimnya pemahaman di bidang ketenagakerjaan khususnya prosedur bekerja di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan latar belakang pendidikannya, di mana seseorang yang berpendidikan rendah cenderung kesulitan dalam pengambilan keputusan yang akan memberi dampak jangka panjang baginya. Hal ini sejalan dengan Mabogunje (1970) dan Kritz & Zlotnik (1992), yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan bermigrasi dipengaruhi salah satunya oleh faktor psikologis, yang ditentukan oleh umur atau pendidikan. Sehingga, faktor psikologis sangat menentukan dalam pengambilan keputusan menjadi pekerja migran. Keputusan seseorang untuk menjadi pekerja migran sangat beragam.

Selanjutnya perubahan sosial ekonomi bagi keluarga TKW juga dirasakan dalam meningkatkan perekonomian keluarga. Hal ini karena penghasilan yang diperoleh lebih dari cukup. Adanya dampak positif yang dirasakan seperti: 1) Upah kerja yang dihasilkan sebagian besar diteruskan untuk kebutuhan keluarga meliputi biaya pendidikan anak, biaya kesehatan, biaya makan sehari-hari, modal usaha, membangun rumah, memiliki kendaraan, memiliki perabotan, hingga barang elektronik, 2) Peningkatan perekonomian keluarga jangka panjang akan berpengaruh terhadap pembangunan di daerah asalnya, 3) Sadar akan pentingnya pendidikan sebagai langkah awal merubah status sosial, banyaknya orang tua sebelum berangkat menjadi TKW tidak memikirkan pendidikan anak. Setelah menjadi TKW, banyak para orang tua merencanakan tabungan untuk pendidikan anaknya hingga sarjana. Adapun dampak negatif yang dialami keluarga TKW seperti: 1) Pola asuh anak yang tidakimbang, sehingga dapat menimbulkan ketidakharmonisan keluarga, 2) Tingginya resiko yang dialami para TKW (kekerasan atau kecelakaan yang tidak diinginkan), 3) Kebutuhan biologis pasangan yang tidak tercukupi, sehingga tingginya kasus perceraian.

Tugas pokok dari DKBP3A adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang spesifik pada masing-masing bidang. DKBP3A Kabupaten Serang memiliki empat bidang yaitu bidang pengendalian, penyuluhan dan penggerakan. Kedua, bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketiga, bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender. Keempat, bidang perlindungan anak. Pada penelitian ini yang menjadi fokus peneliti ialah terhadap pengarusutamaan gender yang dikepalai oleh kepala bidang advokasi dan 48 Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (PUG dan PP). Dalam hasil penelitian yang ditemukan peneliti dari hasil wawancara, didukung dengan observasi dan dokumentasi bahwasanya upaya yang dilakukan oleh DKBP3A tentunya memerlukan strategi baik dalam perumusannya maupun dalam pelaksanaannya. Mulai dari perumusan kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mana hal ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan atau keadilan gender dengan memerlukan strategi yang dibangun untuk mengorganisasikan gender menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dari perencanaannya, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan pembangunan nasional.

Kemudian DKBP3A juga membuat kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk Peran Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang kemudian disosialisasikan kepada tiap kecamatan Kabupaten Serang. Pelaksanaan PUG harus mempertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Kemudian upaya yang dilakukan DKBP3A dalam mencapai kesetaraan gender khususnya tenaga kerja PMI adalah dengan sosialisasi dan juga pemberdayaan pembinaan ekonomi. Sosialisasi diberikan secara merata kepada tiap kecamatan. Hal ini bertujuan agar sosialisasi yang berlangsung dapat dirasakan dan diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. Sosialisasi yang diberikan mengenai pemahaman gender, konsep gender, serta sosialisasi yang bekerja sama dengan stakeholder lainnya seperti Disnakertrans Kabupaten Serang mengenai pemberdayaan perempuan, hingga pemahaman atau pencegahan keberangkatan PMI ilegal. Hal ini perlu dilakukan secara berulang agar memberi pemahaman utuh bagi mereka yang memilih menjadi PMI. Tidak hanya fokus pada keberangkatannya dan penempatannya saja tetapi pemerintah bertanggung jawab juga atas kepulangan PMI yang sudah selesai atau habis kontrak kerjanya. Diharapkan PMI memiliki pengetahuan dan pengalaman kerja dapat dikembangkan di negara sendiri. Sejalan dengan salah satu faktor peningkatan perekonomian yaitu pengelolaan keuangan, berkaitan dengan pengendalian pengeluaran yang tidak boleh melebihi pemasukan yang diperoleh. Oleh karenanya, selain DKBP3A dibantu oleh UPT BP2MI beserta stakeholder lainnya juga memberikan perlindungan ekonomi yang dilaksanakan melalui edukasi keuangan PMI dan keluarganya bersamaan dengan membentuk pelatihan usaha serta membantu mengembangkan dan membina usaha mandiri diharapkan mampu menjaga kestabilan ekonomi keluarga secara mandiri

KESIMPULAN

Persepsi perempuan mengenai kesetaraan gender dalam konteks peningkatan perekonomian keluarga yang dilakukan di Desa Wanayasa Kecamatan Pontang menghasilkan perbedaan persepsi yaitu 1) persepsi positif bahwasanya memperbolehkan perempuan bekerja jika untuk membantu perekonomian keluarga, dan memiliki izin suami atau pihak keluarga lainnya, 2) persepsi negatif yaitu beranggapan bahwa perempuan pekerja migran meninggalkan perannya sebagai ibu, yang mana pola asuh anak diberikan kepada pihak keluarga sehingga kurangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Adapun yang beranggapan bahwa menjadi pekerja migran memiliki resiko yang besar seperti jauh dari keluarga, dan mengkhawatirkan adanya tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.

Pemerintah sudah melakukan upaya dalam mengatasi kesenjangan gender dengan adanya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Pengarusutamaan gender merupakan upaya untuk mencapai kesetaraan atau keadilan gender dengan memerlukan strategi yang dibangun untuk mengorganisasikan gender menjadi satu kesatuan yang menyeluruh dari perencanaannya, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan pembangunan nasional, Kemudian pemerintah daerah melalui DKBP3A juga membuat kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk Peran Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang kemudian disosialisasikan kepada tiap kecamatan Kabupaten Serang.

Peneliti menyadari penelitian ini jauh dari kata sempurna, terdapat keterbatasan peneliti dan kekurangan baik secara materi maupun penelitian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setuklusnya kepada semua pihak yang terlibat. Terima kasih kepada Masyarakat Desa Wanayasa yang telah meluangkan waktunya bersedia menjadi narasumber. Terima kasih kepada pihak DKBP3A Kabupaten Serang yang telah menerima peneliti dengan baik dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdain. 2014. Peran Sistem Ekonomi Islam Dalam Menanggulangi Tingkat Kesenjangan Sosial. *Jurnal Muamalah*. 4(2). <https://doi.org/10.24256/m.v4i2.656>
- Alaslan Amtai, et al. 2021. Persepsi Masyarakat Dan Kepemimpinan Perempuan. *Jurnal Ilmu Administrasi*. 10(20). <https://doi.org/10.31219/osf.io/89mnq>
- Darmansyah M., 1986, Ilmu Sosial Dasar, Surabaya: Usaha Nasional
- Fibrianto, A. S. 2016. Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Analisa Sosiologi*. 5(1). 10(27). <https://doi.org/10.20961/jas.v5i1.18422>
- Fitriana, 2018, Ilmu Kesejahteraan Keluarga, Banda Aceh: Syiah Kuala University Press
- Ikhwanul, P. R. 2014. Peran Ibu Rumah Tangga Nelayan Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Keluarga Di Kecamatan Bitung Karang Ria Kecamatan Tuminting Kota Manado. *Acta Diurna Komunikasi*. 3(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/5997>
- Jamaludin Ujang, et al. 2023. Membentuk Karakter Sejak Dini: Peran Keluarga Dan Pendidikan Dalam Membentuk Pribadi Yang Berkarakter. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*. 9(2). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1117>
- Jamaludin Ujang. 2023. Pengelolaan Manajemen Peserta Didik Dalam Meningkatkan Karakter Siswa. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*. 9(2). <https://doi.org/10.36989/didaktik.v9i2.1052>
- Juwandi Ronni. 2023. Analisis Dampak Pembangunan Bendungan Karian Pada Aspek Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sukarame Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak-Banten. *Al-DYAS: Jurnal Inovasi dan Pengabdian kepada Masyarakat*. 2(2). <https://doi.org/10.58578/alldyas.v2i2.1154>
- Kamil, Iskandar, 2014, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan, Jakarta: Mahkamah Agung RI
- Karim M. R, 1993, Berbagai Aspek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Pt. Tiara Wacana Yogya dan P3EI UII
- Puspitawati, H. 2012. Gender Dan Keluarga: Konsep Dan Realita Di Indonesia. Bogor: PT IPB Press
- Sukamdinata, N.S., 2017. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Umar, et al. 2019. Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan. Ponorogo: Cv. Nata Karya